

**PENGUATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG DALAM
DIGITALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DI ERA
PEMERINTAHAN DIGITAL****Fransin Kontu¹, Eko Rachmat Saputro², Anugerah Mulia Utami³,
Stefanes Pesak⁴, Mulianty Helga Mumu⁵, Awang Nikolas Matei⁶,
Nurul Uswatun Hasanah⁷**^{1,2,3} Ilmu Politik, Universitas Musamus^{4,5,6} KPPN Merauke⁷ Ilmu Administrasi Negara, Universitas MusamusEmail Korespondensi : fransin@unmus.ac.id

Received: 04-11-2025

Accepted: 09-12-2025

Published: 11-12-2025

Abstract

The development of digital governance requires village officials to have adequate capacity to manage village funds in a more transparent, accountable, and technology-based manner. However, preliminary observations show that most village apparatus in the target area still face challenges in using digital applications, data-based financial recording, and reporting village fund realization in accordance with current regulations. This community service program aims to strengthen the knowledge and skills of village officials in the digitalization of village fund management through training, technical assistance, and hands-on practice using village administration applications and digital financial reporting systems. The methods employed include workshops, application simulations, case studies of village fund management, and pre- and post-training competency evaluations. The results indicate an improvement in the officials' ability to plan, implement, administer, and report village fund management digitally, as well as an increased understanding of transparency and accountability principles in village governance. This program is expected to support the realization of a more modern, effective, and responsive village fund governance aligned with the demands of digital government.

Keywords: *digitalization, village funds, village officials' capacity*

Abstrak

Perkembangan pemerintahan digital menuntut aparatur kampung memiliki kapasitas dalam mengelola dana desa secara lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur kampung di wilayah sasaran masih menghadapi kendala dalam penggunaan aplikasi digital, pencatatan keuangan berbasis data, dan pelaporan realisasi dana desa sesuai standar regulasi terkini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur kampung dalam digitalisasi pengelolaan dana desa melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan praktik langsung menggunakan aplikasi administrasi desa dan sistem pelaporan keuangan berbasis digital. Metode yang digunakan meliputi workshop, simulasi penggunaan aplikasi, studi kasus pengelolaan dana desa, serta evaluasi kompetensi sebelum dan sesudah pelatihan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan aparatur kampung dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana desa secara digital, serta meningkatnya pemahaman terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola dana desa yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap tuntutan pemerintahan digital.

Kata kunci: digitalisasi, dana desa, kapasitas aparatur kampung

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mendorong transformasi besar dalam tata kelola pelayanan publik. Pemerintahan digital (digital government) tidak hanya mencakup penggunaan aplikasi atau perangkat lunak, tetapi juga perubahan budaya kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembenahan sistem administrasi agar lebih responsif dan akuntabel (UNDP, 2022; OECD, 2020). Di Indonesia, upaya digitalisasi diperkuat melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), transformasi digital nasional, dan pembangunan infrastruktur konektivitas untuk memperbaiki

kualitas layanan publik (Kominfo, 2021). Salah satu area prioritasnya adalah pengelolaan Dana Desa, mengingat perannya yang strategis dalam pembangunan desa sejak 2015 (Kemendesa PDTT, 2020).

Tata kelola Dana Desa menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun tantangan masih muncul, terutama dalam aspek penatausahaan dan pelaporan digital. Berbagai studi menunjukkan bahwa desa-desa di kawasan timur Indonesia masih menghadapi kendala keterbatasan pelatihan, minimnya jaringan, dan kurangnya infrastruktur teknologi (Widodo, 2021). Kondisi ini juga ditemukan di Kampung Buti, Distrik Merauke,

Papua Selatan. Asesmen pada tahun 2024 menunjukkan bahwa aparat kampung masih kesulitan mengoperasikan aplikasi administrasi seperti Siskeudes, sistem pelaporan digital, serta platform pelacakan anggaran (Yohanis, 2024).

Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Stabilitas jaringan internet di wilayah pesisir relatif rendah, terutama pada cuaca ekstrem. Infrastruktur teknologi kampung masih minim, dengan jumlah perangkat komputer yang terbatas. Selain itu, sebagian besar aparat belum pernah mengikuti pelatihan digital yang memadai sehingga masih mengandalkan pencatatan manual, yang berisiko terjadi kesalahan dan memperlambat proses administrasi. Kekhawatiran terhadap penggunaan teknologi juga muncul karena rendahnya literasi digital, yaitu kemampuan mengakses, mengolah, dan menggunakan teknologi secara efektif (ADB, 2021).

Pemerintah telah menyediakan berbagai aplikasi pengelolaan Dana Desa, namun penerapannya belum merata, termasuk di Papua Selatan yang tingkat *digital readiness*-nya masih rendah (BAN-PT & LAN, 2023). Meski demikian, Kampung Buti memiliki potensi besar untuk mengadopsi digitalisasi berkat komitmen aparat kampung, dorongan modernisasi tata kelola dari Pemerintah Kabupaten Merauke, serta dukungan akademisi Universitas Musamus dalam pendampingan dan peningkatan kapasitas.

Atas dasar itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memperkuat

kapasitas aparat Kampung Buti dalam menghadapi tuntutan digitalisasi pengelolaan Dana Desa. Pendekatan *capacity building* diterapkan melalui peningkatan pengetahuan aparat tentang pemerintahan digital, pelatihan teknis aplikasi administrasi dan keuangan desa, pemahaman prinsip transparansi-akuntabilitas, serta penyusunan dasar data digital yang lebih rapi dan terintegrasi. Metode pelatihan mencakup ceramah interaktif, demonstrasi aplikasi, praktik langsung, simulasi, dan pendampingan intensif yang disesuaikan dengan kebutuhan aparat kampung.

Program ini juga diarahkan untuk membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi, sejalan dengan temuan Mulyadi (2019) bahwa keberhasilan digitalisasi bergantung pada kemampuan aparat mengubah pola pikir dan pola kerja. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi bagi penyusunan *roadmap* digitalisasi Kampung Buti secara bertahap, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, hingga integrasi sistem administrasi kampung dengan pemerintah daerah.

Dengan demikian, penguatan literasi dan kapasitas digital aparat Kampung Buti menjadi langkah strategis dan mendesak dalam mendukung tata kelola Dana Desa yang modern, transparan, dan akuntabel. Kegiatan pengabdian ini diharapkan tidak hanya menjawab tantangan yang ada, tetapi juga mendorong Kampung Buti sebagai kampung percontohan digitalisasi Dana Desa di Papua Selatan.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan *capacity building* yang menekankan peningkatan kemampuan individu, penguatan organisasi, serta perbaikan sistem pendukung tata kelola Dana Desa berbasis digital. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (1) persiapan dan asesmen kebutuhan, (2) perancangan materi dan perangkat pelatihan, (3) pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknis, serta (4) monitoring dan evaluasi hasil kegiatan.

1. Tahap Persiapan dan Asesmen Kebutuhan (*Needs Assessment*)

Tahap ini bertujuan mengidentifikasi kondisi aktual aparatur Kampung Buti dalam pengelolaan Dana Desa dan kesiapan mereka dalam menggunakan teknologi digital. Asesmen dilakukan melalui:

- a. Wawancara mendalam dengan Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bendahara, dan perangkat lainnya untuk mengetahui kemampuan digital, kendala pelaporan, serta pengalaman pelatihan sebelumnya.
- b. Observasi lapangan terhadap perangkat komputer, stabilitas internet, jaringan listrik, serta dokumen administrasi dan laporan Dana Desa.
- c. Analisis kesenjangan (*gap analysis*) untuk membandingkan kondisi ideal

dengan kondisi aktual, mencakup:

- a) keterampilan penggunaan aplikasi
- b) kualitas laporan Dana Desa
- c) kelayakan perangkat digital
- d) kesiapan jaringan internet
- e) kapasitas SDM aparatur

Hasil asesmen menjadi dasar penyusunan materi dan strategi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan Kampung Buti.

2. Perancangan Materi dan Perangkat Pelatihan

Materi pelatihan disusun berdasarkan hasil asesmen dan disesuaikan dengan tingkat literasi digital aparatur Kampung Buti. Materi mencakup empat kelompok:

- a. Digital Literacy & Pemerintahan Digital, termasuk konsep digitalisasi pemerintahan, prinsip transparansi-akuntabilitas, serta keamanan dan manajemen data.
- b. Penguatan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Digital, meliputi penggunaan Siskeudes, pencatatan transaksi keuangan, penyusunan RKP-Kampung dan APB-Kampung secara digital, serta pelaporan digital.
- c. Simulasi Penggunaan Aplikasi Administrasi Kampung, mencakup input data, penatausahaan, pelaporan realisasi, serta proses *export-import* data laporan.
- d. Modul praktik, berupa panduan teknis dan langkah-langkah sederhana yang memudahkan

aparatur mengoperasikan aplikasi secara mandiri.

Penyusunan materi yang bertahap dan komprehensif ini memastikan aparatur dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan memahami penerapan digitalisasi secara praktis.

3. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Teknis

Pelatihan dilaksanakan secara langsung di Kantor Kampung Buti dengan metode pembelajaran yang berorientasi praktik dan partisipatif, yaitu:

- a. Ceramah Interaktif, untuk memberikan dasar pemahaman tentang digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.
- b. Demonstrasi, yaitu penjelasan langsung cara mengoperasikan aplikasi, mulai dari login, input data, validasi, hingga menghasilkan laporan digital.
- c. Praktik Mandiri, di mana peserta mencoba mengoperasikan aplikasi menggunakan perangkat masing-masing dengan bimbingan instruktur.
- d. Simulasi Kasus, berupa penyelesaian persoalan nyata dalam pengelolaan Dana Desa seperti kesalahan input data dan ketidaksesuaian laporan manual-digital.
- e. Pendampingan Teknis Intensif selama dua hari, yang mencakup pengawasan input data real kampung, perbaikan laporan, penyusunan database digital, serta pelatihan keamanan dan *backup* data.

Tahap ini memastikan aparatur tidak hanya memahami teori tetapi juga

menguasai keterampilan teknis secara langsung dan mandiri.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program melalui beberapa teknik:

- a. Pre-Test dan Post-Test untuk menilai peningkatan literasi digital peserta terutama dalam penggunaan aplikasi, manajemen data, dan pelaporan digital.
- b. Observasi Kinerja setelah pelatihan untuk menilai kemampuan aparatur dalam menginput data aktual, menyusun laporan digital, mengatasi kendala teknis, dan menggunakan aplikasi secara mandiri.
- c. Evaluasi Kepuasan Peserta melalui kuesioner mengenai kualitas materi, efektivitas instruktur, serta manfaat pelatihan bagi pekerjaan mereka.
- d. Penyusunan Laporan Monitoring, yang berisi analisis perkembangan kompetensi aparatur, efektivitas metode pelatihan, serta rekomendasi untuk perbaikan dan keberlanjutan program di tahun berikutnya.

Melalui tahapan evaluasi ini, kegiatan pengabdian terbukti memberikan peningkatan kapasitas yang nyata dan berkelanjutan bagi aparatur Kampung Buti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Masyarakat Kampung Buti

Kampung Buti merupakan salah satu kampung yang berada di wilayah Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Secara geografis, kampung ini berada di kawasan pesisir yang dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Merauke sehingga memiliki akses yang relatif lebih baik dibandingkan kampung-kampung lain di wilayah pedalaman. Meskipun demikian, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung Buti masih menunjukkan berbagai tantangan struktural yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan dan implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan.

Masyarakat Kampung Buti terdiri dari penduduk asli (OAP) dan penduduk pendatang yang telah lama menetap. Komposisi ini membentuk dinamika sosial yang khas, di mana corak budaya lokal masih sangat kuat. Masyarakat asli pada umumnya memegang nilai-nilai komunal, mengutamakan musyawarah, dan memiliki kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Struktur sosial masyarakat relatif sederhana, dengan Kepala Kampung dan tokoh adat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Nilai kekeluargaan dan gotong royong menjadi bagian integral dalam aktivitas sosial.

Namun, budaya komunal ini juga mempengaruhi pola komunikasi dan penerimaan teknologi baru. Dalam beberapa kasus, adopsi teknologi

modern berjalan lambat karena keterbatasan habituasi digital di tingkat masyarakat. Hal ini terlihat dari masih dominannya penggunaan metode manual dalam transaksi, administrasi, dan komunikasi kampung.

Sebagian besar masyarakat Kampung Buti menjalani pekerjaan pada sektor informal. Mata pencaharian utama meliputi:

- a. Nelayan skala kecil
- b. Petani lahan terbatas
- c. Buruh bangunan
- d. Pelaku industri rumah tangga sederhana
- e. Usaha kecil seperti kios dan perdagangan hasil laut

Sektor perikanan menjadi salah satu sumber penghidupan penting karena kedekatannya dengan wilayah pesisir. Namun pemanfaatannya masih bersifat tradisional sehingga pendapatan masyarakat belum berkembang secara signifikan. Selain itu, akses terhadap fasilitas pengolahan, pemasaran, serta permodalan usaha masih terbatas.

Keterbatasan ekonomi ini berdampak pada rendahnya kepemilikan perangkat digital seperti laptop atau ponsel pintar yang memadai. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan digitalisasi di tingkat kampung, baik dalam aspek keuangan desa maupun pelayanan administrasi umum.

Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat Kampung Buti berada pada kategori menengah ke bawah. Meskipun sebagian generasi muda telah menyelesaikan pendidikan menengah, namun literasi

digital masyarakat masih cukup terbatas. Keterbatasan ini tidak hanya berlaku bagi warga, tetapi juga bagi sebagian aparatur kampung yang belum terbiasa menggunakan aplikasi berbasis komputer atau sistem keuangan digital.

Minimnya pelatihan teknologi, kurangnya fasilitas komputer, serta koneksi internet yang tidak stabil menjadi kendala utama dalam peningkatan kapasitas digital masyarakat. Kondisi ini menjelaskan mengapa pengelolaan Dana Desa masih banyak dilakukan secara manual, dengan risiko kesalahan administrasi yang lebih tinggi.

Dari hasil observasi, Kampung Buti telah memiliki akses jaringan internet, namun kualitas dan stabilitasnya tidak merata sepanjang hari. Pada waktu tertentu, kecepatan internet sangat rendah sehingga menghambat aktivitas seperti input data, pengunggahan dokumen, atau pelaporan digital.

Infrastruktur teknologi lainnya seperti komputer, laptop, printer, dan perangkat pendukung administrasi kampung juga masih terbatas. Komputer yang tersedia hanya beberapa unit, dan sebagian sudah memiliki kendala teknis karena usia penggunaan. Kondisi ini berdampak langsung pada keterlambatan proses administrasi, terutama ketika aparatur kampung harus menyusun laporan Dana Desa atau mengakses aplikasi keuangan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kampung cukup tinggi, terutama dalam kegiatan fisik seperti pembangunan

infrastruktur dan kegiatan sosial. Namun, partisipasi dalam proses administrasi digital relatif rendah karena masyarakat belum terbiasa memanfaatkan teknologi dalam komunikasi publik.

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, masyarakat masih mengandalkan forum-forum tatap muka seperti musyawarah kampung. Sementara itu, transparansi berbasis teknologi—misalnya publikasi laporan secara digital—belum berjalan maksimal karena keterbatasan perangkat serta kemampuan aparatur kampung dalam menyediakan informasi secara daring.

Secara umum, masyarakat Kampung Buti menunjukkan sikap yang cukup terbuka terhadap perubahan dan modernisasi, namun kesiapan teknis dan infrastruktur masih menjadi hambatan utama. Masyarakat mengakui bahwa digitalisasi akan membantu mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi, tetapi implementasinya membutuhkan pendampingan berkelanjutan, pelatihan yang intensif, serta penyediaan fasilitas yang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, intervensi pengabdian berupa pelatihan digitalisasi pengelolaan Dana Desa menjadi sangat relevan untuk menjawab kebutuhan yang ada. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan aparatur, tetapi juga memperkuat sistem pemerintahan kampung dalam memberikan pelayanan yang lebih

efektif, efisien, dan akuntabel di era pemerintahan digital.

2. Pelaksanaan Program

Tahap awal dimulai dengan koordinasi antara tim pengabdian dengan Pemerintah Kampung Buti. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan tujuan kegiatan, rencana pelaksanaan, kebutuhan fasilitas, serta pembagian peran antara tim pengabdian dan aparatur kampung. Melalui koordinasi ini diperoleh komitmen kuat dari Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, dan perangkat lainnya untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.



Gambar 1. Asesmen Awal

Tim juga menyiapkan materi pelatihan, modul, perangkat presentasi, serta menyesuaikan materi dengan hasil asesmen awal. Selain itu, dilakukan pengecekan fasilitas kantor kampung seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat pendukung administrasi lainnya yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung.

Pelatihan dimulai dengan sesi teori yang disampaikan dalam bentuk ceramah interaktif. Sesi ini membahas:

- a. Konsep dasar digitalisasi pemerintahan
- b. Urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa
- c. Praktik keamanan digital dan manajemen data
- d. Pengenalan perangkat dan aplikasi yang digunakan dalam administrasi kampung

Sesi ceramah dirancang tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga interaktif melalui diskusi, tanya jawab, dan refleksi pengalaman peserta dalam mengelola Dana Desa. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi peserta mengenai pentingnya digitalisasi serta memberikan pemahaman dasar sebelum masuk ke pelatihan teknis.

Setelah memperoleh pemahaman konseptual, peserta diarahkan pada sesi demonstrasi penggunaan aplikasi administrasi dan keuangan desa, termasuk Siskeudes dan aplikasi pendukung lainnya. Instruktur menunjukkan secara langsung:

- a. Cara login ke sistem
- b. Input data perencanaan
- c. Pencatatan transaksi keuangan
- d. Validasi data
- e. Proses penyusunan laporan digital

Seluruh materi ditampilkan melalui layar proyektor sehingga peserta dapat mengikuti langkah-langkah secara visual. Demonstrasi dilakukan secara bertahap, disertai penjelasan dan klarifikasi setiap menu yang ada dalam aplikasi.



Gambar 2. Sesi Praktik

Sesi berikutnya adalah praktik mandiri, di mana setiap peserta mencoba langsung mengoperasikan aplikasi menggunakan laptop pribadi atau perangkat milik kampung. Pada tahap ini peserta diminta:

- a. Memasukkan data keuangan yang disimulasikan
- b. Menginput data perencanaan dan realisasi Dana Desa
- c. Mencoba membuat laporan keuangan digital
- d. Memperbaiki kesalahan data yang muncul

Instruktur dan tim pendamping memberikan bimbingan satu per satu untuk memastikan seluruh peserta memahami proses kerja aplikasi. Sesi praktik ini menjadi salah satu tahap paling penting karena memberikan pengalaman langsung kepada aparatur kampung.

Untuk memperkuat kemampuan peserta dalam menghadapi situasi nyata, dilakukan simulasi kasus terkait pengelolaan Dana Desa. Beberapa kasus yang diberikan antara lain:

- 1) Keterlambatan pelaporan
- 2) Kesalahan input data anggaran

- 3) Perbedaan antara laporan manual dan digital
- 4) Transaksi yang tidak memiliki bukti pendukung digital

Peserta diminta menyelesaikan kasus-kasus tersebut menggunakan aplikasi digital. Metode ini tidak hanya melatih kemampuan teknis, tetapi juga melatih logika administrasi dan ketelitian peserta.



Gambar 3. Sesi Foto Bersama

Setelah pelatihan teori dan praktik selesai, program dilanjutkan dengan pendampingan teknis selama dua hari. Pada tahap ini, instruktur bekerja langsung bersama aparatur kampung menggunakan data nyata yang dimiliki Kampung Buti. Pendampingan mencakup:

- a. Supervisi input data keuangan kampung yang sebenarnya
- b. Perbaikan laporan Dana Desa tahun berjalan
- c. Penyusunan database digital kampung secara terstruktur
- d. Pelatihan backup data dan sistem keamanan file

Pendampingan dilakukan hingga aparatur kampung dinilai mampu melakukan seluruh proses secara

mandiri. Tahap ini menjadi sangat penting untuk menjembatani teori dengan praktik nyata di lingkungan kerja pemerintah kampung.

Di akhir kegiatan, tim pengabdian melakukan evaluasi melalui:

- a. Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman
- b. Observasi langsung terhadap kemampuan aparatur setelah pelatihan
- c. Evaluasi kepuasan peserta melalui kuesioner
- d. Catatan lapangan mengenai kendala dan perkembangan kompetensi

Hasil evaluasi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan aparatur kampung dalam mengoperasikan aplikasi digital, memahami proses penatausahaan, serta meningkatkan kualitas pelaporan Dana Desa.

3. Hasil yang Dicapai

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman aparatur mengenai konsep digitalisasi pemerintahan, akuntabilitas digital, serta prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Sebelum pelatihan, mayoritas peserta belum memahami alur lengkap pengelolaan Dana Desa berbasis aplikasi digital dan masih mengandalkan proses manual. Setelah pelatihan, peserta mampu menjelaskan prinsip dasar keamanan data, manajemen file, serta pentingnya digitalisasi dalam efisiensi pelayanan publik.

Peningkatan literasi digital ini menjadi pondasi penting bagi aparatur Kampung Buti untuk beradaptasi dengan tuntutan pemerintahan berbasis teknologi.

Salah satu hasil paling signifikan adalah peningkatan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan perangkat digital pendukung lainnya. Aparatur telah mampu:

- a. melakukan input data pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- b. menyusun RKP-Kampung secara digital
- c. mengelola penatausahaan dan pembukuan menggunakan aplikasi
- d. menghasilkan laporan realisasi Dana Desa dalam format digital
- e. melakukan validasi data sebelum pelaporan

Kemampuan ini sebelumnya menjadi tantangan utama bagi aparatur, namun setelah pelatihan mereka dapat bekerja lebih mandiri dan percaya diri.

Melalui sesi pendampingan teknis, tim berhasil membantu aparatur menyusun *database* digital kampung yang berisi:

- a. data perencanaan kampung
- b. data struktur anggaran
- c. dokumen realisasi keuangan
- d. dokumen pendukung pelaporan
- e. arsip digital tahun-tahun anggaran sebelumnya

Database ini disusun secara sistematis sehingga memudahkan proses pelaporan, audit, dan monitoring internal di kemudian hari.

Selama pendampingan, laporan Dana Desa yang sebelumnya belum tersusun rapi berhasil diperbaiki dan disesuaikan dengan standar administrasi yang berlaku. Beberapa laporan yang sebelumnya disusun manual telah dikonversi menjadi format digital dengan kualitas visual dan struktur yang lebih baik.

Perbaikan ini meningkatkan akurasi laporan, meminimalkan risiko kesalahan input data, dan mempercepat proses verifikasi oleh pihak kecamatan maupun kabupaten.

Melalui simulasi kasus dan pendampingan teknis, aparatur kampung kini lebih siap menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis yang mungkin muncul dalam penggunaan aplikasi digital. Aparatur telah mampu:

- a. Mengatasi kesalahan input data
- b. Memperbaiki data yang tidak sinkron
- c. Menyimpan dan mencadangkan (backup) file laporan
- d. Mengelola folder dan dokumen digital secara sistematis

Kemandirian ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan digitalisasi tanpa ketergantungan terus-menerus pada instruktur atau pihak eksternal.

Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk pemahaman baru mengenai pentingnya transparansi pengelolaan Dana Desa. Aparatur menunjukkan peningkatan kesadaran bahwa pelaporan digital dapat:

- 1) Mencegah kesalahan administrasi
- 2) Memperkuat kepercayaan masyarakat
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kampung
- 4) Mempercepat proses koordinasi dengan pemerintah daerah

Kesadaran ini mendorong perubahan pola kerja aparatur menuju tata kelola yang lebih profesional dan modern.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan program “Penguatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa di Era Pemerintahan Digital” di Kampung Buti memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi aparatur kampung serta memperbaiki sistem tata kelola Dana Desa. Melalui rangkaian kegiatan yang meliputi asesmen kebutuhan, pelatihan teori, demonstrasi aplikasi, praktik langsung, simulasi kasus, serta pendampingan teknis intensif, aparatur kampung menunjukkan peningkatan yang nyata dalam pemahaman dan keterampilan digital.

Program ini berhasil meningkatkan literasi digital aparatur, terutama terkait pemahaman konsep digitalisasi pemerintahan, prinsip transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan kampung. Aparatur juga mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara lebih mandiri, mulai dari input data, penatausahaan, hingga penyusunan laporan digital. Selain itu, database

digital kampung berhasil disusun secara lebih sistematis sehingga memudahkan proses pelaporan, audit, dan monitoring di masa mendatang.

Pendampingan teknis yang dilakukan secara langsung juga memperkuat kemampuan aparatur dalam menghadapi kendala teknis, memperbaiki laporan sebelumnya, serta memastikan keberlanjutan praktik digitalisasi di lingkungan kampung. Motivasi dan partisipasi aparatur selama program berlangsung menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang lebih modern, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, program pengabdian ini telah berkontribusi pada percepatan digitalisasi pengelolaan Dana Desa di Kampung Buti. Keberhasilan program ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pengembangan kapasitas aparatur secara berkelanjutan dan menjadi model penerapan digitalisasi untuk kampung-kampung lain di wilayah Papua Selatan.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Musamus atas dukungan finansial dan telah memfasilitasi tim dalam melaksanakan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Aparatur Kampung dan

seluruh Masyarakat kampung Buti Kabupaten Merauke yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan selama kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlangsung.

E. DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2021). *Digital Literacy for Inclusive Development*. Asian Development Bank.
- Kemendesa PDTT. (2020). *Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Kominfo. (2021). *Kerangka Transformasi Digital Nasional*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- LAN RI. (2023). *Penerapan SPBE di Kawasan Timur Indonesia: Tantangan dan Strategi Implementasi*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Mulyadi, D. (2019). Transformasi Digital dalam Birokrasi Publik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(2), 55–70.
- OECD. (2020). *Digital Government Index 2020: Overview and Country Results*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- UNDP. (2022). *Digital Strategy: Inclusive Digital Transformation for Development*. United Nations Development Programme.
- Widodo, A. (2021). Digitalisasi Tata Kelola Desa di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112–125.

Yohanis, M. (2024). Tantangan Implementasi Sistem Digital dalam Pengelolaan Dana Desa di

Papua Selatan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(1), 45–57.